

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MOJOKERTO



RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2016

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana kerja merupakan rencana yang bersifat strategis, akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun sebagai acuan penyusunan kegiatan dengan mempertimbangkan unsur-unsur masalah dan potensi yang dimiliki sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sedangkan tuntutan kebutuhan program pembangunan yang berorientasi pada kestabilan bidang politik, kokohnya kesatuan dan persatuan bangsa untuk mewujudkan visi misi tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto.

Proses penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, melalui kajian strategis lingkungan internal dan eksternal untuk menetapkan tujuan, maka dari itu disusunlah rencana program dan kegiatan yang dilengkapi dengan rincian pendanaan (anggaran). Kedudukan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2016 dalam periode dukungan Rencana Strategis (Renstra) merupakan Penjabaran Pelaksanaan Perencanaan Kegiatan Tahun yang ke-2 dari Renstra Tahun 2014 – 2019.

Keterkaitan antara dokumen Renja SPKD dengan dokumen Renstra SKPD merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja Renstra Bakesbangpol Kota Mojokerto. Dengan SKPD Pemerintah Kota Mojokerto dan RPJMD merupakan salah satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto khususnya dalam menjalankan rencana agenda pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kota Mojokerto.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kota Mojokerto berdasarkan pada perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2014-2019;
12. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah;
13. Perwali Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tupoksi Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kota Mojokerto.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan, Politik Kota Mojokerto Tahun 2016 adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang politik dan pelayanan masyarakat, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan dapat tercapai.
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring dan evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
3. Memberikan informasi kepada kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana kegiatan tahunan.

4. Menjadi kerangka dasar dan alat ukur kinerja pelayanan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto Tahun 2016 adalah :

1. Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.
2. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.
3. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik.
4. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan.
5. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan.
6. Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (stakeholders).
7. Memudahkan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menghadapi masa depan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto Tahun 2016 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD.
- 3.3. Progrm dan Kegiatan.

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto tahun lalu (tahun 2015) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2016) yang mengacu pada APBD tahun berjalan yang pada waktu penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun-tahun sebelumnya.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto tahun lalu dan realisasi Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto dan/atau realisasi APBD, dengan tabel 1 sebagai berikut :

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi serta norma dan standar pelayanan SKPD. Hasil analisis pencapaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto, sebagaimana tabel 2 sebagai berikut :

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan kesatuan bangsa dan politik tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Bakesbangpol meliputi SDM, sarana dan prasarana serta system perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, yaitu :

1. Belum optimalnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur dan jati diri bangsa;
2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi dalam proses politik;
3. Belum optimalnya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat/FKDM;
4. Masih rendahnya tingkat koordinasi dan konsultasi antar pihak terkait dalam penanganan keamanan dan ketertiban;
5. Belum semua Ormas/LSM melaporkan aktifitasnya;
6. Kurang berdayanya institusi-institusi demokrasi, peningkatan kemajuan, perlindungan, pemenuhan dan penegakan HAM;
7. Lemahnya penegakan supremasi hukum, rendahnya kesadaran hukum pada masyarakat dan kurangnya perhatian terhadap kelompok masyarakat yang rentan akan pelanggaran HAM;
8. Tingginya angka kriminalitas ;
9. Unjuk rasa/ demonstrasi yang cenderung meningkat.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam upaya mewujudkan misi ketentraman dan ketertiban melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum, maka program pembangunan yang akan dilakukan sebagaimana tabel 3 sebagai berikut :

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program/kegiatan yang diperoleh dari hasil verifikasi Renja SKPD Tahun 2016, tidak ada program/kegiatan yang diusulkan dari pemangku pimpinan (stakeholder) baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan , LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kota Mojokerto.

Hasil pengerjaan pada bagian penelaah usulan program dan kegiatan dari masyarakat sebagaimana tabel 4 sebagai berikut :

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD adalah :

1. Meningkatnya kesadaran wawasan kebangsaan bagi masyarakat dengan memberikan pemahaman tentang pentingnya bernegara dan bermasyarakat yang baik.
2. Penurunan angka kriminalitas dengan meningkatkan swadaya masyarakat dalam menjaga lingkungan bersama.
3. Mewujudkan kesiapsiagaan seluruh komponen (pemerintah, lembaga dan masyarakat) dalam menghadapi ancaman kemungkinan terjadinya konflik.

Beberapa indicator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan kesatuan bangsa tersebut meliputi :

1. Meningkatnya toleransi dan kerukunan umat beragama ;
2. Meningkatnya rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat ;
3. Fasilitasi forum pembauran kebangsaan ;
4. Meningkatnya wawasan kebangsaan ;
5. Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan memainkan music dalam mengiringi kegiatan upacara ;
6. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman pengelolaan administrasi keuangan bantuan Parpol ;
7. Terciptanya kondisi politik yang aman dan kondusif.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan kesatuan bangsa dan politik tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Bakesbangpol meliputi SDM, sarana dan prasarana serta system perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi :

1. Otonomi Daerah memberikan peluang pada Pemerintah Kota Mojokerto untuk melaksanakan berbagai kewenangan yang lebih luas dalam rangka mengurus rumah tangga daerah;

2. Ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang relatif memadai sehingga sangat membantu pelaksanaan tugas sehari-hari. Hal ini menyangkut fasilitas gedung ruangan kantor, ruang rapat, sarana transportasi, maupun peralatan perkantoran yang cukup memadai sesuai dengan standar yang ditentukan;
3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat fungsional;
4. Sumber Daya Aparatur Pegawai Bakesbangpol sebagian besar berpendidikan Sarjana, hal ini merupakan salah satu pendorong dan modal dasar untuk menciptakan profesionalisme penyelenggaraan layanan ;
5. Tersedianya hasil-hasil kegiatan, meliputi: data LSM/ORMAS, data parpol, FKUB, FPK, Forum kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum komunikasi Intelegen Daerah (Forkominda), Paskibraka, anggota Korsik ;
6. Fasilitasi dan koordinasi kegiatan upacara dengan instansi terkait ;
7. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

Peningkatan penyelenggaraan pelayanan Bakesbang Kota Mojokerto tersebut, dalam pelaksanaannya masih dijumpai berbagai permasalahan yang menghambat kinerja pelayanan Bakesbangpol Kota Mojokerto antara lain:

1. Masih adanya data yang kurang akurat / valid
2. Adanya kepentingan politik yang tidak sejalan dengan Tupoksi ;
3. Penempatan personil yang tidak sesuai dengan kompetensi jabatan;
4. Kurangnya dukungan masyarakat;
5. Globalisasi yang mempengaruhi isu sara dan berkurangnya nilai kebangsaan dan patriotisme.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD

Dalam rangka menjabarkan dan melaksanakan visi Kota Mojokerto, Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto ditetapkan sebagai berikut :

“Terwujudnya Masyarakat Kota Mojokerto yang Partisipatif, Demokratis, Aman dan Damai dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Untuk mewujudkan visi tersebut Bakesbangpol telah menetapkan **Misi** sebagai berikut:

“ Menumbuh kembangkan semangat kebangsaan dan kerukunan masyarakat Kota Mojokerto yang partisipatif, demokratis dan beretika dalam wadah NKRI”

Berdasarkan misi yang telah ditetapkan di atas, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tujuan :

“ Meningkatkan kehidupan masyarakat kota Mojokerto yang kondusif”

Sasaran :

- 1. Meningkatnya peran nilai – nilai agama, etika, norma budaya dan wawasan kebangsaan sebagai landasan moral bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.***
- 2. Meningkatnya kualitas LSM/ORMAS/ PARPOL***

3.3. Program dan Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan Bakesbangpol Kota Mojokerto yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2014 – 2019 merupakan serangkaian langkah dari penjabaran strategi – strategi yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran. Rencana program kerja ini akan menjadi pegangan dan acuan Bakesbangpol dalam melakukan kegiatan perencanaan pembangunan Kota Mojokerto dengan lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi), maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto pada tahun 2016 mempunyai program kerja yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1. Mewujudkan keamanan dan kenyamanan lingkungan**
Program yang dilakukan pada urusan keamanan dan kenyamanan lingkungan adalah :

- Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
2. Mewujudkan pemahaman kesatuan bangsa.
Program yang dilakukan pada urusan kesatuan bangsa adalah :
 - Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
 - Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
 3. Mewujudkan stabilitas ketahanan bangsa dan kewaspadaan nasional.
Program yang dilakukan pada ketahanan bangsa dan kewaspadaan nasional adalah :
 - Program Pembinaan dan Pengembangan Kewaspadaan Nasional.
 4. Mewujudkan kesadaran politik masyarakat dalam berdemokrasi.
Program yang dilakukan pada kesadaran politik adalah :
 - Program Pendidikan Politik Masyarakat.
 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas
Program yang dilakukan pada urusan manajemen adalah :
 - Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - Program Pengembangan data/informasi.
 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
 - Program Peningkatan disiplin Aparatur

Berdasarkan program-program yang telah ditetapkan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto merencanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, kegiatannya :
 - a. Pembinaan kewilayahan
2. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, kegiatannya :
 - a. Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama.
 - b. Peningkatan Rasa Solidaritas dan ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat.
 - c. Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa.
 - d. Pemantapan Forum Pembauran Kebangsaan.
 - e. Sosialisasi Wawasan Kebangsaan
3. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, kegiatannya
 - a. Seminar, Talk Show dan Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan.
 - b. Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Upacara.

4. Program Pendidikan Politik Masyarakat, kegiatannya :
 - a. Penyuluhan kepada Masyarakat
 - b. Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik
 - c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- 5..Program Pembinaan dan Pengembangan Kewaspadaan Nasional, kegiatannya :
 - a. Pemantapan Kewaspadaan Nasional bagi FKDM dan Forkominda.
 - b. Peningkatan dan Pengembangan Sistem Deteksi Dini terhadap Konflik di Masyarakat.
 - c.. Pemantapan Kegiatan Orang Asing.
 - d. Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaani
6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, kegiatannya :
 - a. Penyusunan Rencana Kerja (Renja).
7. Program Pengembangan data/informasi, kegiatannya :
 - a. Penyusunan Profil Daerah.
8. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, kegiatannya :
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan endaraan dinas/operasional
 - d. Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - e. Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - f. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
 - g. Penyediaan alat tulis kantor
 - h. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - i. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - j. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - k. Penyediaan bahan logistic kantor
 - l. Penyediaan makanan dan minuman
 - m.Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - n. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
9. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur, kegiatannya :
 - a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - b. Pengadaan peralatan gedung kantor
 - c. Pengadaan meubelair
 - c. Pengadaan computer dan kelengkapannya
 - d. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
 - e. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor

10. Program Peningkatan disiplin aparatur, kegiatannya :

a. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.

11. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, kegiatannya :

a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

b. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Program dan kegiatan, berdasarkan hasil pengerjaan pada bagian perumusan program dan kegiatan sebagaimana tabel 5 sebagai berikut :

BAB IV

PENUTUP

Rencana Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto Tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman, acuan dan tolok ukur dalam melaksanakan kegiatan perencanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Tahun 2016 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto.

Rencana Program dan Kegiatan 2016 sebagai kelanjutan peningkatan dan perluasan dari program kerja tahun sebelumnya dan berpedoman pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto.

Dalam mewujudkan dan mencapai target dan indikator – indikator yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan memang tidak mudah dan akan banyak ditemui tantangan serta kendala baik dari dalam penyelenggara pemerintahan sendiri maupun dari masyarakat. Untuk itulah diperlukan komitmen yang tinggi dan dukungan dari pihak terkait terutama para pemangku kebijakan (stakeholders) agar keberhasilan pelaksanaan kegiatan rencana penyelenggara pemerintah dapat tercapai dengan tidak menyimpang dari acuan yang ditetapkan dalam dokumen Renstra.

Dengan demikian, hasil-hasil dari perencanaan kegiatan pembangunan pada akhirnya akan dapat dirasakan dan dinikmati secara lebih adil dan merata terutama bagi seluruh lapisan masyarakat Kota Mojokerto.

,KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MOJOKERTO

Ir. SRIYONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19600806 198508 1 002

WALIKOTA MOJOKERTO

MAS'UD YUNUS

